

Soal batalnya pameran patung Marsinah Letkol Badril: "Silakan jalan, bila ada izinnnya"

Surabaya, Surya

Pameran seni rupa yang mengambil tema "Marsinah" karya pelukis Moelyono dibatalkan, karena secara itu belum ada izinnnya. Hal-hal yang menyangkut museum dan keramaian harus ada izin," ujar Kapolresto Surabaya Selatan, Letkol (Pol) Badril Riza SmIK. "Kalau Letkol (Pol) Drs Badril Rizal seperti tertafia kemarin, Jumat (13/8) menanggapi soal "dibatalkannya" pameran seni rupa di galeri Dewan Kesenian Surabaya (DKS).

Menurut Badril, tidak ada maksud tertentu polisi dalam membatalakan pameran seni rupa tersebut, kecuali hanya soal izin saja. "Jangan salah persapi dulu, seolah polisi tidak memperbolehkan seseorang untuk menampilkannya. Silakan jalan terus asal ada izinnnya," kata Badril saat mendampingi Karohilwiltas Surabaya, Kol (Pol) Drs S Binsantoro.

Seperti diberitakan Surya kemarin, untuk pertama kalinya, pameran seni yang diselenggarakan Dewan Kesenian Surabaya (DKS) di galeri DKS dilarang polisi. Pameran seni rupa yang menampilkan rangkaian peristiwa terbunuhnya Marsinah, buruh PT EPS Sidoarjo, karya Moelyono itu menurut rencana akan dibuka, Kamis (12/8) pukul 19.00. Tapi dibatalkan polisi. Pameran itu merupakan kerja sama antara DKS, Yayasan Seni Rupa Komunitas (YSRK) dan Komite Solidaritas Untuk Marsinah (KSUM).

Badril menjelaskan, polisi dalam melakukan penindakan harus sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sudah ada ketentuan, lanjut dia, bahwa setiap acara keramaian yang mengundang massa harus ada izin dulu dari kepolisian. "Keccuali acara perkawinan atau sonatan," katanya.

Undang pertanyaan

Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Iadin) Surabaya, Trimoeji D Saerjadi SH mengatakan, "Kalau yang dikatakan Ketua Presidium Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Aribowo benar, bahwa dulu DKS tak pernah meminta izin jika menyelenggarakan pameran seni di

Galeri DKS, mengapa kali ini dipersoalkan?"

Ia katakan, sekarang bukan waktunya lagi menggunakan pendekatan keamanan. "Kalaupun mau keterbukaan," ujar Trimoeji.

Soal Marsinah ini kini kan jadi perhatian internasional. Kebetulan seniman Moelyono mengambil tema Marsinah dalam karya seni rupanya yang dipamerkan itu. Kalau pameran ini dilarang, apa justru tak akan merugikan kita di mata dunia internasional?" ujar Trimoeji. Muair SH dan Dadang Trisa songko SH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya juga menyayangkan pelanggaran pameran karya Moelyono itu. "Acara itu kan diadakan di galeri DKS dan bersifat rutin. Apa perlunya? Lalu apa artinya DKS kalau demikian. Wah, kalau acara seperti ini harus izin, bisakah polisi kewalahan melayani permohonan izin dari masyarakat," ujar Muair SH.

Dadang Trisasongko menuturkan, pelanggaran pameran karya Moelyono itu merupakan tindakan berlebihan.

"Kalau orang-orang tak dilarang menulis soal Marsinah dan dimuat di surat kabar, mengapa seniman Moelyono yang mengambil tema Marsinah untuk karya seninya dilarang mempublikasikannya. Ini kan tak adil," ujar Dadang.

Ia berharap agar kasus pameran seni rupa karya Moelyono dilihat dari kacamata seni. "Seni itu jujur. Kalau karya seni dibat dari kacamata seni, kesalahan bahaman tak akan terjadi," ujar Dadang.

Apakah penitit penyelenggara akan mengurus izin ke polisi untuk pameran karya Moelyono itu? "Saya masih akan berembuk dengan pengurus. Kalau ini saja dilarang, apa kami nggak bisa saja kalau mengurus izin," ujar Aribowo, Ketua Presidium DKS dengan nada pesimis.

Moelyono sendiri sangat terpuak dengan pelanggaran pameran karya seni rupanya itu. "Kalau karya seni telah ditafsirkan secara politis, yang ada di benak kami sekarang pengungulan kreativitas. Saya sangat menginginkan kejelasan soal ini," ujar Moelyono. (dir/pjh)